

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009.

1. Visi

Visi pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMD tahun 2009-2013 adalah :

***“Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat
Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat
Adil dan Sejahtera”***

Adapun makna yang dimaksud dalam Visi Kalimantan Timur tersebut diuraikan seperti berikut :

- a) **Pusat Agroindustri Terkemuka**, adalah menjadikan Kalimantan Timur sebagai kawasan terkemuka di bidang agroindustri tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Pasifik, ditandai dengan berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis, industri pengolahan yang menghasilkan input maupun yang memanfaatkan produk hasil pertanian (industri hulu dan hilir) seperti terbangunnya kawasan industri Kariangau, Maloy dan lainnya.
- b) **Pusat Energi Terkemuka**, adalah menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat energi terkemuka di Indonesia yang ditandai dengan tersedianya kebutuhan energi dengan memanfaatkan secara optimal pada sumber energi yang tidak terbaharukan seperti gas alam, batubara; terbangunnya

sumber energi alternatif dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan tenaga surya, tenaga angin dan bioenergi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan energi.

- c) **Masyarakat Adil**, adalah masyarakat Kalimantan Timur yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa membedakan ras, suku, agama dan latar belakang dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- d) **Masyarakat Sejahtera**, adalah masyarakat Kalimantan Timur yang terpenuhi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Secara keseluruhan, ini berarti bahwa pembangunan daerah Kalimantan Timur dimuarakan kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian ditetapkan slogan pembangunan daerah Kalimantan Timur adalah :

“Membangun Kaltim untuk Semua”

2. Misi

- a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa untuk Mewujudkan Kaltim sebagai “Island Of Integrity”.
- b) Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Sistem Demokrasi yang Kondusif.

- c) Mewujudkan Kawasan Perbatasan Menjadi Beranda Depan Negara dan Percepatan Pembangunan di Wilayah Pedalaman dan Terpencil.
- d) Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berdaya Saing dan Pro Kerakyatan dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.
- e) Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera.
- f) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berakhlak Mulia.
- g) Mewujudkan Perbaikan Sistem Subsidi, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan/Pengentasan Masyarakat Miskin.

Visi dan misi Kepala Daerah tersebut dijabarkan dalam 3 agenda pembangunan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan menjadi pilar pokok mencapai “Kaltim Bangkit 2013”, yaitu :

- a) Menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- b) Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Agenda 1 : Menciptakan Kaltim yang Aman Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

- a) Strategi
 - 1) Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik.
 - 2) Peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas SKPD.
 - 3) Peningkatan Peran Pengawasan.
 - 4) Peningkatan Upaya Pencegahan, Percepatan Pemberantasan dan Penindakan Kasus Korupsi.

- 5) Peningkatan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- 6) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum serta untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilu dan Kegiatan di Daerah.
- 7) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Kesatuan NKRI serta Pemahaman/Sikap Perilaku Masyarakat Berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945.
- 8) Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam upaya Percepatan Pembangunan.
- 9) Peningkatan Kinerja dan Koordinasi Pemerintahan serta Pengembangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 10) Peningkatan Kerjasama dalam Negeri dan Luar Negeri serta Antara Pemerintah dan Lembaga.
- 11) Pengembangan dan Peningkatan Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- 12) Peningkatan Pengembangan Aparatur Daerah dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis.
- 13) Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Kearsipan.
- 14) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 15) Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- 16) Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 17) Peningkatan Kualitas Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.
- 18) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Hukum.
- 19) Peningkatan Perangkat Hukum dan Penegakkan Hukum.
- 20) Pengembangan dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Informasi serta Sarana dan Prasarana di segenap Wilayah.
- 21) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan.

b) Arah Kebijakan Daerah

- 1) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan serta upaya-upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
- 2) Meningkatkan implementasi prinsip-prinsip good-governance dalam pemerintahan daerah serta upaya pencegahan, percepatan pemberantasan serta penindakan kasus korupsi.
- 3) Penegakkan hukum dan transparansi serta penyempurnaan sistem pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- 5) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum untuk kelancaran pemilu dan kegiatan di daerah melalui partisipasi masyarakat dan meningkatkan fungsi Polmas yang dibuat berjenjang searah dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, juga partisipasi Polda, TNI, KODAM, Anggota Linmas dan Ormas Kepemudaan.

- 6) Meningkatkan pemantapan, pemahanan wawasan kebangsaan dalam wilayah NKRI serta sikap perilaku masyarakat yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan pengembangan sistem, metode dan materi dalam rangka peningkatan kewaspadaan.
- 8) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam upaya percepatan pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas, perekonomian, pertumbuhan simpul-simpul ekonomi sehingga menjadi serambi terdepan terhadap Negara tetangga.
- 9) Meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan kapasitas dan koordinasi.
- 10) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta antara pemerintah dan lembaga.
- 11) Mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan melalui upaya penyelesaian persengketaan tata batas wilayah administrasi antar daerah Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara di Kaltim serta optimalisasi penyelenggaran batas wilayah.
- 12) Meningkatkan pengembangan aparatur daerah dan efisiensi organisasi daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis melalui upaya penyempurnaan, SDM, pembinaan serta pengembangan aparatur dan pendidikan kedinasan, reformasi birokrasi dan pemerataan distribusi pegawai sampai ke daerah terpencil dan pedalaman.
- 13) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan kearsipan melalui penyelamatan dan pelestarian dokumen

arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan.

- 14) Meningkatkan penelitian dan pengembangan IPTEK serta pemanfaatan penggunaan hasil penelitian sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- 15) Meningkatkan kualitas penanganan dan penanggulangan bencana melalui pencegahan dini, pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 16) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi serta sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan jaringan teknologi komunikasi dan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penyebarluasan jangkauan informasi ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur.
- 17) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan menerapkan tata pemerintahan yang baik.

2. Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat

a) Strategi

- 1) Pengembangan Struktur Ruang Sesuai RTRW.
- 2) Peningkatan dan Percepatan Upaya Ketahanan Pangan.
- 3) Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan
- 4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas serta Pengembangan Peternakan
- 5) Pengembangan Perkebunan yang Berpotensi dan Bernilai Ekonomis Tinggi.

- 6) Peningkatan Mutu dan Kualitas serta Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani.
- 7) Peningkatan dan Pengembangan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Lokal dan Peningkatan Ekspor.
- 8) Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Serta Potensi Lahan Secara Optimal.
- 9) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Klaster.
- 10) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan kondisi Daerah.
- 11) Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri.
- 12) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- 13) Pemberian Peran yang Lebih Besar pada Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang Mampu Mengangkat citra Perekonomian Kerakyatan.
- 14) Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- 15) Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata.
- 16) Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas dan Merata Untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.
- 17) Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan.
- 18) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas system Transportasi Udara untuk Pergerakan Internasional, Nasional maupun Lokal.

- 19) Peningkatan Kualitas Maupun Kuantitas Sistem Transportasi Laut dalam Menopang Kegiatan Ekspor Impor dan Berperan sebagai penghubung antar Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 20) Pembangunan dan Pengembangan Sarana-Sarana ASDP untuk Menunjang Pergerakan Intermoda
- 21) Pengembangan jaringan Irigasi, Jaringan Daerah Sawah, Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
- 22) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Secara Bertahap dan Konservasi Sumberdaya Air.
- 23) Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, serta pemerataan Kebutuhan Hunian dan Layak Huni.
- 24) Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih
- 25) Peningkatan investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN)
- 26) Peningkatan Sumberdaya hutan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
- 27) Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan
- 28) Inventarisasi Sumber Daya Mineral, batubara, karst dan air tanah serta pemetaan geologi dalam rangka mendukung industri, pemenuhan kebutuhan air, mitigasi bencana alam, geologi dan tata ruang wilayah serta perlindungan terhadap situs arkeologi, potensi wisata dan sumber daya air tanah yang terdapat dalam kawasan karst.
- 29) Penetapan Kebijakan dan Peraturan serta Sistem Pertambangan yang Berorientasi pada Pembangunan yang Berkelanjutan dengan penerapan pengusahaan yang berbasis Good Mining Practice.

- 30) Peningkatan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 31) Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Listrik melalui optimalisasi, konservasi dan diversifikasi dengan memanfaatkan Sumberdaya Alam yang tersedia.
- 32) Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak Melampaui Daya Dukung Lingkungan.

b) Arah Kebijakan Daerah

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (capital intensif) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (labour intensif) dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan dalam struktur ekonomi semakin kecil.
- 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.
- 3) Membangun sektor pertanian yang tangguh yang meliputi; tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan dengan mengembangkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keunggulan kompetitif (competetif advantages) yang berbasis agroindustri.
- 4) Mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang dapat menghasilkan barang setengah jadi sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri hulu.
- 5) Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar wilayah yang mencakup transportasi dan komunikasi, kelistrikan serta air bersih yang menghidupi hajat hidup

orang banyak dan sebagai prasyarat masuknya investasi (direct investment) baik investasi asing maupun dalam negeri.

- 6) Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara RI, wilayah pedalaman dan daerah tertinggal dengan menata dan menggali berbagai potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di perbatasan.
- 7) Pembangunan jalan bebas hambatan.
- 8) Pembangunan dan perbaikan jalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
- 9) Pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan sesuai dengan hirarki di beberapa kab/kota.
- 10) Membangun dan mengembangkan sumber-sumber energi pembangkit listrik alternatif yang potensial, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap atau Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara.
- 11) Pengadaan 1 genset 1 desa.
- 12) Pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan.
- 13) Menjaga dan memelihara kawasan lindung, taman nasional, daerah resapan air dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan kritis dan marginal dalam rangka mengurangi terjadinya bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor.
- 14) Pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai di beberapa Kabupaten/Kota.

3. Agenda 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

a) Strategi

- 1) Penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun Terutama di Wilayah Perdesaan, Pedalaman dan Perbatasan.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan.
- 3) Perluasan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Pendidikan Informal Setingkat Perguruan Tinggi yang Bermutu di Kalimantan Timur.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Kesehatan Sebagai Upaya untuk Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan Usia Harapan Hidup.
- 5) Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular dan Wabah Sejak Dini dengan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan serta Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 6) Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
- 7) Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ibadah Umat Beragama dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keagamaan.
- 8) Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama bagi Setiap Individu dan Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah.
- 9) Peningkatan dan Memantapkan Kerukunan, Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Sehingga Para Pemeluk Agama Dapat Berperan Sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Pembangunan.
- 10) Peningkatan Peran dan Fungsi Pemuda dalam Kegiatan Pembangunan.

- 11)Peningkatan Prestasi Olahraga Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Olah Raga.
- 12)Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya Peningkatan Kemandirian Bekerja Dan Berusaha Serta Berperan Aktif Dalam Pembangunan.
- 13)Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
- 14)Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 15)Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 16)Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- 17)Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta Kependudukan.
- 18)Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kerja sesuai dengan Pasar Kerja Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam upaya mengantisipasi meningkatnya jumlah Angkatan Kerja.
- 19)Peningkatan Peluang Usaha yang Memiliki Daya Saing Tinggi Dengan Mengutamakan Penyerapan Tenaga Kerja Seluas-Luasnya dalam upaya mengurangi pengangguran.
- 20)Peningkatan Kelembagaan dan Penciptaan Pasar Kerja yang Fleksibel.
- 21)Pembentukan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri.

b) Arah Kebijakan Daerah

- 1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang mengarah kepada Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Mengembangkan sekolah-sekolah unggulan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaring siswa-siswa yang berprestasi di setiap daerah sebagai bentuk apresiasi dalam bidang pendidikan.
- 3) Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di wilayah pedalaman, perbatasan, daerah tertinggal dan daerah terpencil.
- 4) Pelayanan kesehatan gratis, Puskesmas 24 jam dengan 1 Puskesmas 2 Dokter.
- 5) Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 6) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas percepatan lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga.
- 8) Meningkatkan manajemen kependudukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 9) Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

C. Prioritas Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 telah menetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. Kemandirian dan kedaulatan pangan;
2. Pengentasan kemiskinan;

3. Pengangguran;
4. Keterbatasan akses permodalan;
5. Reformasi birokrasi/pelayanan publik;
6. Degradasi mutu lingkungan;
7. Daya saing dan iklim investasi;
8. Pendidikan dan pelayanan kesehatan;
9. Infrastruktur;
10. Pembangunan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.